

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliitian dan pembahasan terkait implementasi pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transminis komunikasi diawali dengan penunjukkan sebagai sekolah inklusif kemudian diturunkan Surat Keterangan (SK) dan dilakukan sosialisasi tujuan pendidikan inklusif, sistem penerimaan siswa inklusif hingga sistem penempatan siswa inklusif belajar dalam kelas. Adapun kejelasan komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Namun dalam hal komunikasi masih terjadi inkonsistensi pada pemetaan penerimaan siswa inklusif yang mengalami perubahan namun tidak disosialisasikan terlebih dahulu.
2. Sumberdaya yang tersedia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya masih minim, hal ini karena hanya terdapat 3 Guru Pendamping Khusus (GPK) tidak sebanding dengan 57 siswa inklusif yang harus didampingi. Kemudian belum tersedianya peraturan daerah yang khusus membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya. Kewenangan para implementator telah diajalankan secara optimal, namun ketersediaan fasilitas masih belum mencukupi kebutuhan siswa inklusif.

3. Disposisi atau sikap pelaksana pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya masih terdapat guru yang kesulitan beradaptasi dengan siswa inklusif. Arahan dan tanggapan pelaksana telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kepada Sekolah dan Masyarakat yaitu dengan penanaman budaya inklusif. Sedangkan untuk intensitas respons atau tanggapan pelaksana dilakukan dengan pembentukan Musyawarah Guru Pendamping Khusus (MGPK).
4. Struktur Birokrasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya terpisah dari struktur organisasi sekolah. Namun tetap berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab kepala sekolah.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 29 belum terimplementasi. Hal ini karena masih terjadi inkonsistensi komunikasi, kurangnya sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana yang belum mampu beradaptasi dengan siswa inklusif, dan struktur birokrasi Tim Pengembang Sekolah Inklusif yang tidak tersedia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pendidikan inklusif terutama dalam hal penerimaan siswa baru jenjang Sekolah Menengah Pertama.
2. Diperlukan penambahan Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMP Negeri 29 Surabaya, serta perundang-undangan tingkat Kota Surabaya yang khusus

membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu perlu juga pengadaan, perbaikan dan perawatan fasilitas penunjang pendidikan inklusif.

3. Peningkatan profesionalitas guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui pelatihan dan penanaman budaya inklusif.
4. Perlu struktur organisasi bagi Tim Pengembang Sekolah Inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya yang tertulis secara langsung.